

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM  
BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH (BSBR)  
DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM  
BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH (BSBR)  
DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

ASRIANI

Nomor Stambuk: 10561 11036 16

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

15/03/2021

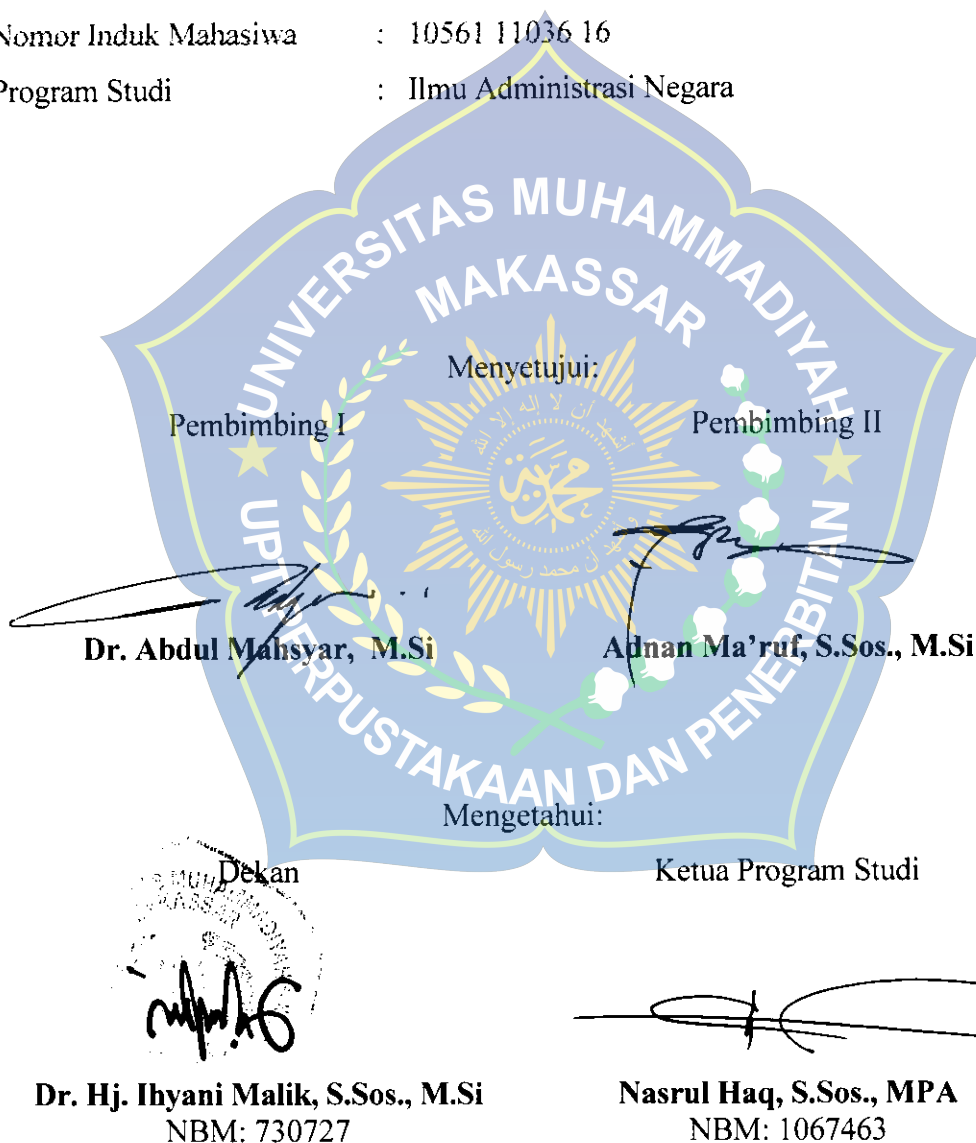
1 kg  
Smb. Alwani

R/0027/ADN/2100  
ASB

i


## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur  
Nama Mahasiswa : Asriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11036 16  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0158/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Februari tahun 2021.



**TIM PENILAI**

Ketua Sekretaris

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** NBM: 730727  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si** NBM: 1084366

**PENGUJI:**

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ( )
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ( )
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si ( )
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ( )

## HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Asriani

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11036 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan,

  
Asriani

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*".

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

8. Kedua orang tua yaitu Bapak Kenden dan Ibu Agu serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
9. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Pembimbing I dan bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
11. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
12. Terima kasih juga saya ucapkan kepada informan dan responden saya yang telah membantu dan meluangkan waktunya.
13. Terima kasih juga teman-teman kelas IAN-A untuk 4 tahun yang sangat berkesan dan berarti.
14. Terima kasih kepada teman seperjuangan dan sepembimbingan yaitu Maulana Alim Muhlis dan Eva Mustika.
15. Terima kasih juga kepada Sist & Brother squad yaitu Dewi, Meysi, Sulas, Dinda, Ika, Jihan, Maulana, Ishaq bambang, Alam, Aswan, Zaenal, dan Fadil karena selalu ada baik dalam keadaan susah ataupun senang selama 4 tahun ini, semoga pertemanannya abadi.

16. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Fildayani, S.IP, Besse Nurul Fadilla, S.IP, dan Nurul Haviva yang selalu memberi semangat, dukungan dan menemani proses penyelesaian skripsi ini.
17. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya tulis namanya satu per satu. Terima kasih karena sudah memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 Februari 2021



## ABSTRAK

### **Asriani, Abdul Mahsyar dan Adnan Ma'ruf. Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) Di Kecamatan Towuti Kabupaten**

Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dengan memberikan bantuan berupa bahan bangunan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki rumah berstatus tidak layak huni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data yang diolah hasil penyebaran instrumen berupa pedoman wawancara dan kuisisioner terhadap narasumber yang menjadi sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagaimana adanya tanpa bermaksud merubah atau membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik informasi program dapat dipahami oleh masyarakat, sumberdaya sudah memadai baik dari pelaksana regulasi dan bantuan, disposisi sudah memiliki sistem dan baik bekerja sesuai dengan aturan dan objektif serta struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja pelaksana perlu meningkatkan kembali pengetahuan mengenai tentang prosedur, wewenang dan regulasi agar dapat bekerja secara maksimal.

**Kata Kunci : Implementasi, Stimulan, Bedah Rumah**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	11
C. Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).....	18
D. Kerangka Pikir.....	22
E. Fokus Penelitian.....	24
F. Definisi Fokus Penelitian.....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Populasi dan Sample.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Teknik Pengabsahan Data.....	35
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	44
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN</b> .....	99
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	115



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah rumah dibedah tahun 2016-2018.....	5
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Skor skala likert .....	32
Tabel 4.1 Anggaran bantuan stimulan bedah rumah yang telah dibedah tahun 2017-2019.....	40
Tabel 4.2 Daftar rencana penerima bantuan.....	40
Tabel 4.3 Komunikasi antar pelaksana berjalan dengan baik.....	46
Tabel 4.4 Sosialisasi yang diterima tidak membingungkan.....	47
Tabel 4.5 Pesan yang disampaikan berpengaruh antar pelaksana.....	48
Tabel 4.6 Rekapitulasi indikator komunikasi.....	49
Tabel 4.7 Proses komunikasi antara pelaksana mampu saling memahami.....	51
Tabel 4.8 Komunikasi dilakukan berlangsung secara menyenangkan.....	52
Tabel 4.9 Pesan yang disampaikan tidak mengakibatkan salah penafsiran.....	53
Tabel 4.10 Rekapitulasi indikator kejelasan.....	54
Tabel 4.11 Perintah yang diberikan konsisten untuk dijalankan.....	55
Tabel 4.12 Perintah yang diberikan kepada pelaksana BSBR tidak berubah-ubah.....	56
Tabel 4.13 Perintah yang diberikan selaras antara perintah dan pelaksanaannya.....	57
Tabel 4.14 Rekapitulasi indikator konsisten.....	58
Tabel 4.15 Pelaksana yang terlibat dalam program BSBR berkompeten dalam bidangnya.....	60
Tabel 4.16 Pelaksana program BSBR memadai dari segi pendidikan.....	61
Tabel 4.17 Tingkat kecukupan pelaksana program.....	62
Tabel 4.18 Rekapitulasi indikator staff atau pegawai.....	63
Tabel 4.19 Pelaksana menggunakan wewenang dengan seobjektif.....	64
Tabel 4.20 Pelaksana mengetahui dan taat terhadap peraturan.....	65
Tabel 4.21 Pelaksanaan program melaksanakan program tugas secara objek.....	66
Tabel 4.22 Rekapitulasi indikator wewenang.....	67

Tabel 4.23 Pelaksana program mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah .....	69
Tabel 4.24 Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap regulasi.....	70
Tabel 4.25 Kepatuhan pelaksana terhadap hukum.....	71
Tabel 4.26 Rekapitulasi indikator informasi.....	72
Tabel 4.27 Tingkat kelengkapan Sarana dan prasarana.....	73
Tabel 4.28 Tingkat kemudahan teknologi.....	74
Tabel 4.29 Fasilitas yang disediakan layak dan memadai untuk digunakan...	75
Tabel 4.30 Tabel rencana pembelian bahan bangunan .....	76
Tabel 4.31 Rekapitulasi indikator fasilitas.....	77
Tabel 4.32 Dedikasi dalam pengangkatan personil.....	79
Tabel 4.33 Secara administrasi terlaksana secara tertib.....	80
Tabel 4.34 Pelaksana merupakan orang yang mengutamakan kepentingan masyarakat.....	81
Tabel 4.35 Rekapitulasi indikator disposisi.....	82
Tabel 4.36 Adanya biaya lebih atau insentif kepada pelaksana.....	83
Tabel 4.37 Adanya kompensasi dari program terhadap pelaksana.....	84
Tabel 4.38 Adanya penghargaan bagi pelaksana yang baik.....	85
Tabel 4.39 Rekapitulasi indikator insentif.....	86
Tabel 4.40 Struktur birokrasi dalam program jelas.....	88
Tabel 4.41 Birokrasi mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik .....	89
Tabel 4.42 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.....	90
Tabel 4.43 Birokrasi yang diterapkan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).....	91
Tabel 4.44 Birokrasi yang diterapkan tidak merugikan .....	92
Tabel 4.45 Rekapitulasi indikator struktur birokrasi.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir..... 22



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya pemerintah dalam merubah dan menggerakkan masyarakat melalui berbagai cara yang dilakukan dengan terarah dan terencana. Tujuan Pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur melalui berkurangnya angka kemiskinan disuatu daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia mencakup kebutuhan sosial, fisik, psikis, dan spritual. Salah satu masalah kemiskinan adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini disebabkan karna ketidakberdayaan mereka memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik.

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakan yang dilihat dari segi fisik, sosial dan mental. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan mengenai fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Jumlah rumah yang tidak layak huni di Indonesia menurut data dari Kementrian PUPR pada tahun 2019 mencapai 43 Juta unit yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota. (Fadilla Yogie, 2019)

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya. Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan rumah layak huni yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Potret tersebut menunjukkan betapa rentangnya permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah tidak layak huni ini tidak dapat diatasi. Dalam hal ini, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan rumah layak huni. Memiliki rumah yang layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dijelaskan bahwa “ tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan jaminan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan pengidupan, serta upaya untuk mencerminkan diri pribadi dalam

meningkatkan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman merupakan bentuk perwujudan tujuan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menjadi ladsan hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Dimana Pasal 1 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ,penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat”.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program – program yang berupaya untuk mengatasi masalah pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengeluarkan program yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal dengan program bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang memiliki kondisi rumah tidak layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada dasarnya adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan



rendah untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pemenuhan rumah layak huni. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak untuk dihuni.

Program serupa juga telah diterapkan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan nama program yaitu Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki/meningkatkan kualitas rumah sehingga dapat dihuni dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Tujuan dari bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yaitu untuk memberdayakan kemudian meningkatkan kemandirian masyarakat supaya mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah sehingga layak untuk di huni.

Program bantuan stimulan bedah rumah ini dalam pelaksanaannya memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan senilai Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) perunit rumah bagi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang juga merupakan pedoman pelaksanaan penerima bantuan stimulan bedah rumah di Kabupaten luwu Timur, dimana peraturan ini merupakan hasil revisi dari peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah perlu dilakukan penyempurnaan serta efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan,

penyaluran, dan pemanfaatan penerima bantuan sehingga perlu untuk diganti.

Program Bantuan stimulan bedah rumah ini di mulai sejak tahun 2016 yang dikeolah oleh Dinas Tata Ruang Dan Permukiman (TARKIM), Jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sebesar 10 unit per tahun dengan anggaran Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) per unit rumah. Jumlah keseluruhan rumah yang dibangun dan telah dibedah di Kecamatan Towuti (Desa Tole, Kalosi, Libukan Mandiri, Buangin, Mahalona) hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Rumah Yang Menerima Bantuan Kecamatan Towuti (Desa Tole, Kalosi, Libukan Mandiri, Buangin, Mahalona) Tahun 2017-2019**

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Yang Menerima Bantuan			Total
		2017	2018	2019	
1	Tole	10	10	10	30
2	Kalosi	10	10	10	30
3	Libukan Mandiri	10	10	10	30
4	Buangin	10	10	10	30
5	Mahalona	10	10	10	30
	<b>TOTAL</b>				<b>150</b>

Setelah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) ini berlangsung, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal dalam tahap pelaksanaannya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Towuti dimana masih terdapat penerima bantuan stimulan bedah rumah dari anggaran tahun sebelumnya yang belum menyelesaikan pembangunan, dimana seharusnya pembangunan diselesaikan sebelum anggaran bedah

rumah tahun selanjutnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan dana yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) berupa bahan bangunan. Dengan bantuan yang hanya berupa bahan bangunan atau bahan material, masyarakat merasa dengan hanya bantuan tersebut tanpa adanya biaya untuk menyewa pekerja, masyarakat harus menyiapkan dana untuk menyewa pekerja sehingga masyarakat yang belum mempunyai dana akan menunda perbaikan rumah yang pada akhirnya menyebabkan penyelesaian perbaikan tidak sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yang dijalankan seharusnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rumah sehingga layak untuk dihuni, tetapi masyarakat penerima bantuan merasa dana yang diberikan kurang untuk membangun rumah sehingga juga memperlambat lajunya penyelesaian perbaikan rumah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam dan membahas mengenai **Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

### D. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi khususnya.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian – penelitian secara lebih dalam mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).

##### 2. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang diikuti oleh penulis guna menjadi referensi untuk penelitian yang terkait dengan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yang dimana penelitian terdahulu ini akan dibandingkan dengan program yang diteliti penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Bima Ghafaralie, (2013), Implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing dilihat dari variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Variabel komunikasi perlu dalam memberikan informasi agar lebih ditingkatkan, serta adanya peningkatan kinerja pelaksana, terutama pelaksana yang diberikan kewenangan dan melaksanakan	Penelitian ini berfokus pada keberhasilan implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan berfokus pada Komunikasi, Disposisis, Sumber daya, dan Struktur birokrasi dalam pelaksanaannya, kemudian penelitian penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, serta melihat permasalahan yang

			perintah dalam program RTLH tersebut.	terjadi di masyarakat terkait program tersebut
2	Andi Fajar Nugraha, (2014), Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang	Kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program RS-RTLH belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya keterlibatan penuh dari pihak yang terkait dalam program RS-RTLH menjadi pelaksana, masih ada pihak pelaksana yang pemahamannya terbatas, serta belum sepenuhnya bersosialisasi program RS-RTLH kemasyarakat.	Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang yang berfokus dengan organisasi, penerapan, interpretasi, sedangkan penelitian penulis kali ialah tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan berfokus pada Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi, Sumberdaya.
3	Ahmad Nawi dan Asih Widi Lestari, (2018), Implementasi Kebijakan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitan menunjukkan; (1) Implementasi Kebijakan Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menghasilkan sistem kebijakan, komunikasi yang baik, Sumber Daya	Penelitian kali ini ialah Implementasi Kebijakan Program RS-RTLH terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan berfokus pada Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

	<p>Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu</p>		<p>Manusia yang mampu mengkomudir segala aspek, Disposisi masyarakat terhadap program tersebut ada yang menanggapi positif dan ada juga yang menanggapi secara negatif, dan Struktur Birokrasi yang baik menjamin terselenggaranya seluruh program Desa Sumbergondo; (2) Faktor pendukung Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (3) faktor penghambat Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah kurangnya dana yang diberikan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan</p>	<p>Sedangkan penelitian penulis ialah Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif dan deskriptif kuantitatif.</p>
--	--	--	--	---

Dari tabel penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu ingin melihat kebijakan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) lebih kepada komunikasi pelaksana yang terlibat, sumberdaya yang digunakan dalam program ini, bagaimana disposisi serta struktur birokrasi. Penulis juga menggunakan jenis

penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif untuk melihat lebih jelas dan mendapatkan data yang lebih *real* untuk dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan.

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik salah satunya adalah Implementasi kebijakan. Implementasi sering diartikan hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Dalam kenyataanya, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal serta dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

### **1. Definisi Implementasi Kebijakan**

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suratman (2017) menjelaskan makna implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian atau kegiatan- kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan.

Menurut Wahab dalam Mustari N (2015) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.



Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2007) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan kelompok atau individu – individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya.

Menurut Tahjan dalam Mahsyar dkk (2020) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Bila dirangkaiakan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana.

Menurut Lester dan Steward dalam Agustino (2008) mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat diukur atau dari proses pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tidak atau tercapainya tujuan – tujuan yang diraih.

Menurut Nugroho dalam Adi Fajar Nugraha (2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan kebijakan publik, ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan program atau melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan definisi yang disampaikan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh implementor atau pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh pemahaman apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian – kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman – pedoman kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sesuai tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

## 2. Model Pendekatan Implementasi kebijakan

Menurut Agustino, Leo (2008) dalam rangkai menjalankan implementasi kebijakan maka diperlukan model implementasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yaitu:

### a. Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward yang disebut dengan *Dired and Indirect Impact on Implementation*. Ada empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan

peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personal yang tepat.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan kesedian sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *Carry Out* kebijakan secara efektif.

## 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai suatu pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ini efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan akan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan.

## 4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebarkan sumber daya sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan *Framentasi*". Menurut Winarno *Standard Operational Procedure (SOP)*

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sementara fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

b. Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut dirumuskan oleh Metter dan Vorn disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation*. Artinya dalam proses implementasi sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dalam hubungan berbagai variabel.

Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi sosial dan politik

c. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- 3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

d. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasika, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan suatu implementasi ditentukan oleh implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- 2) Jenis mamfaat yang akan dihasilkan

- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (siapa) pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasi, yaitu:

- 1) Kepentingan, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Menurut Charles O. Jones dalam Juanda MP (2017) model implementasi program dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi.

#### 1) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

#### 2) Interpretasi

Para pelaksana sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

#### 3) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

### **C. Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)**

## 1. Definisi Program BSBR

Rumah mempunyai fungsi yang sangat besar bagi keluarga dan individu tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental. Untuk menunjang manfaat rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman dan nyaman sebagai tempat berlindung. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memiliki persyaratan tersebut bukanlah hal mudah.

Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki/ meningkatkan kualitas rumah sehingga dapat dihuni dengan layak dalam lingkungan yang sehat. Tujuan bantuan stimulan bedah rumah (BSBR) yakni untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dengan sasaran BSBR sendiri yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

## 2. Landasan Hukum

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 1 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa “Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan

kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat”.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang juga merupakan pedoman pelaksanaan penerima bantuan stimulan bedah rumah di Kabupaten Luwu Timur, dimana peraturan ini merupakan hasil revisi dari peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah perlu dilakukan penyempurnaan serta efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan, penyaluran, dan pemanfaatan penerima bantuan sehingga perlu untuk diganti.

### **3. Indikator Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)**

#### **a. Kriteria Penerima Bantuan**

- 1) Penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria :
  - a) Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b) Memiliki atau menguasai tanah;
  - c) Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kabupaten;
  - d) Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - e) Diutamakan bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenis dari Pemerintah (dalam kurun waktu 5 tahun terakhir);
  - f) Bersedia berswadaya dan membentuk KPB; dan



g) Bersungguh – sungguh mengikuti BSBR.

2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a) Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas dibuktikan dengan fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah atau keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
- b) Tidak dalam sengketa; dan
- c) Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah

**b. Persyaratan Obyek Bantuan**

- 1) Persyaratan obyek bantuan meliputi kerusakan pada atap, lantai dan dinding pada rumah yang akan diperbaiki.
- 2) Kondisi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Rusak berat;
  - b) Rusak ringan atau sedang luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga, yaitu 9 meter persegi per orang;
  - c) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh MBR sampai paling tinggi struktur tengah; dan
  - d) Bahan lantai, dinding dan atap tidak layak

**c. Persyaratan Usulan Calon Penerima Bantuan**

Persyaratan usulan calon penerima BSBR dari desa/kelurahan sebagai berikut :

- 1) Surat usulan dari desa/ kelurahan dilengkapi daftar data rinci penerima yang terdata dalam database rumah tidak layak huni masing – masing desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang pembentukan KPB Desa/ Kelurahan
- 3) Surat permohonan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 4) Surat pernyataan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 5) Surat kesepakatan sosial kelompok penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 6) Fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima bantuan stimulan bedah rumah
- 7) Fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala Desa/ Lurah
- 8) Surat pernyataan penghasilan sebagaimana
- 9) Daftar rencana pembelian bahan bangunan

#### **d. Dampak BSBR**

Dampak atau *impact* dalam bahasa inggris yang bersinonim dengan kata *effect* (akibat). Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum yang mengalami benturan ini.

Adapun dampak Bantuan Stimulan Bedah Rumah ( BSBR) antar lain :

### 1) Kondisi Sosial

Kondisi sosial menggambarkan terjadinya suatu interaksi dan relasi sosial antara orang, menampilkan tugas – tugas sosial dan akses terhadap pelayanan sosial. Pada variabel kondisi sosial ini yang diukur adalah kegiatan bersama anggota keluarga, kegiatan bersama dengan saudara/*family*, tetangga dekat dan kegiatan sosial di lingkungan.

### 2) Kondisi Psikologis

Kondisi psikologi menggambarkan seseorang merasa aman, nyaman, betah/tentram, dihargai dan bermartabat. Pada variabel kondisi psikologis ini diukur adalah rasa betah/tentram, aman, nyaman dan perilaku hidup bersih.

## D. Kerangka Pikir

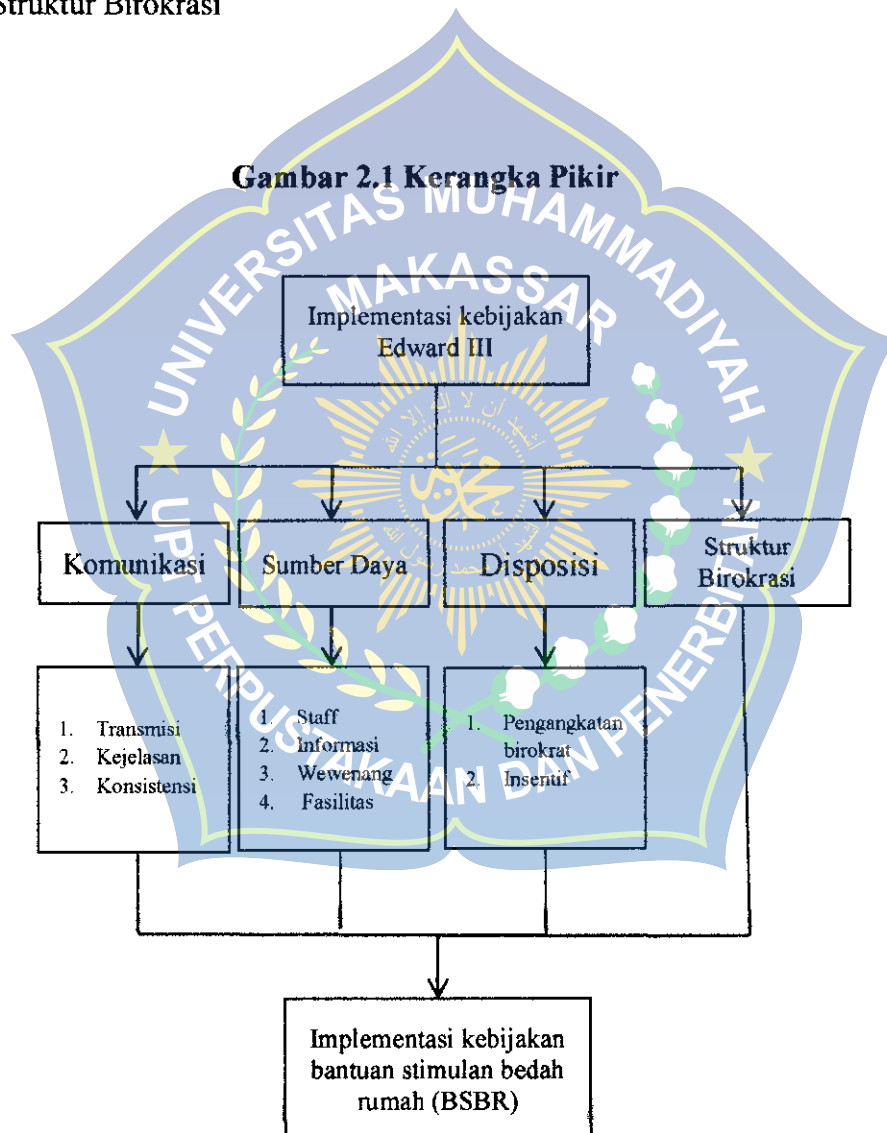
Kerangka pikir merupakan alur berpikir peneliti, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir.

Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan merehabilitasi atau memperbaiki rumah masyarakat yang berstatus tidak layak huni. Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) ini bisa dikatakan sangat membantu masyarakat yang mempunyai rumah yang tidak layak huni yang ber kriteria agar dapat merasakan keamanan, kenyamanan, serta kesehatan dalam kesehariannya di tempat tinggalnya.

Menurut Edward III ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir tersebut, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

## F. Defenisi Fokus Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, ada beberapa fenomena yang akan diamati dan di nilai dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut Edward III ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan. Variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik antar birokrasi yang terlibat dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus dilakukan dengan baik sehingga tidak adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang menjadi tujuan dari pada Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dapat tercapai.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus jelas dan tidak membingungkan. Komunikasi yang jelas ini bertujuan agar tidak terjadinya penyelewengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan yaitu eektivitasnya pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya salah tafsir akan substansi kebijakan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang dibiarkan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasi kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu :

a. *Staff*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yaitu para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Diperlukannya implementor yang memiliki mencukupi, memadai, ataupun kompeten dengan bidangnya. Diperlukannya (*the right man in the right place*).

- b. Informasi, pelaksana Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apakah orang yang dilibatkan dalam proses kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), efektifitas pelaksana diharapkan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam pelaksanaan program tersebut, tidak melaksanakan program untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi harus murni sesuai obyek Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah.
- d. Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan Implementor agar dapat menjalankan tugasnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), lebih khusus lagi memilih orang yang benar-benar kepentingannya untuk masyarakat.
- b. Insentif; memberikan keuntungan atau biaya lebih kepada pelaksana Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan salah satu langkah yang harus diberikan agar dapat mendorong sekaligus menjadi motivasi agar pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) melaksanakan tugasnya dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus jelas sehingga kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini diperlukan agar tidak menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan atau program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dalam jumlah besar, program tersebut dinilai masih belum maksimal dalam tahap pelaksanaannya.

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai dari bulan November sampai dengan bulan Januari 2021. Situasi pandemi saat ini mengakibatkan proses pengumpulan data yang memakan waktu yang cukup lama karena harus mengikuti protokol kesehatan sehingga dalam proses pengambilan data tetap mengutamakan keselamatan kesehatan.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih *indevenden* tanpa menghubungkan, atau membuat perbandingan dengan variabel yang lain. Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan Wawancara dan menyusun beberapa pertanyaan sesuaikan dengan definisi operasional penelitian.

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuisioner kepada pelaksana BSBR terkait proses pelaksanaan program BSBR dan wawancara terhadap masyarakat yang menerima bantuan BSBR terkait kualitas program BSBR.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip atau laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah daftar penerima bantuan BSBR, struktur organisasi BSBR dan Regulasi program bantuan BSBR.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah bagian keseluruhan dalam suatu objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdapat dua yaitu pelaksana diambil dari 5 desa yang berjumlah 15 orang dan masyarakat penerima bantuan BSBR dari 5 desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang berjumlah 150 orang

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan memnetukan kriteria-kriteria tertentu. Jumlah sampel masyarakat yang dijadikan informan adalah sebanyak 10 orang dan jumlah sampel pelaksana yang dijadikan responden adalah sebanyak 15 orang.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2017) bahwa pengumpulan data dapat diambil dari hasil observasi, wawancara, dan kuisioner. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

#### 1. Obsevasi

Observasi adalah semua dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui organisasi. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah obsevasi terus terang karena dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

#### 2. Wawancara

Didalam penelitian ini penulis menggunakan data dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap dapat memberikan informasi atau data – data yang berkaitan dengan

permasalahan – permasalahan didalam penelitian ini.

### 3. Koesioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, Sugiyono (2017). Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi tentang tanggapan yang berkaitan dengan persoalan atau masalah yang diteliti. Pengumpulan data dengan dengan memberikan pernyataan yang meliputi implementasi program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penggunaan kuisisioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendukung penelitian. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuisisioner dengan model Skala likert. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017) skala likert digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat dan persepsi individu atau sekelompok orang mengenai fenomenal sosial. Mengenai skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item yang bisa berupa pertanyaan maupun pernyataan. Jawaban dari setiap item instrumen yang digunakan skala likert memiliki gradasi mulai dari yang sangat positif hingga negatif.

Untuk mengukur variabel tersebut digunakan skala likert sebanyak empat tingkat , yaitu:

**Tabel 3.1 Skor Skala Likert**

No	Pilihan Jawaban	Kode	Skor/Nilai
1.	Sangat Setuju	SS	4
2.	Setuju	S	3
3.	Tidak Setuju	TS	2
4.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Tidak setuju (TS)
- d. Sangat Tidak Setuju (STS)

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda yaitu untuk jawaban SS memiliki skor 4, jawaban S memiliki skor 3, jawaban TS memiliki skor 2 dan jawaban STS memiliki skor 1. Metode ini digunakan sehingga peneliti dapat mengetahui serta memiliki data mengenai penilaian yang diberikan dari masyarakat kemudian dapat ditarik kesimpulan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dan diukur dari indikator-indikator variabel yang diberikan oleh peneliti.

Instrumen peneliti adalah alat yang digunakan dalam mengukur fenomena sosial yang diamati. Berdasarkan alat ukur yang digunakan oleh peneliti, maka instrumen penelitian dibuat adalah sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Instrumen penelitian ini didasarkan atas teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edwar III, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel :

1. Komunikasi :

- Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik)
- Kejelasan (komunikasi harus jelas dan tidak ambigu)
- Konsisten (komunikasi harus konsisten dan jelas)

2. Sumberdaya :

- Staf (pegawai/staf)
- Informasi (informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi kepatuhan pelaksana)
- Wewenang (otoritas atau legitimasi pelaksana kebijakan)
- Fasilitas (sasaran dan prasarana pendukung kebijakan)

3. Disposisi :

- Pengangkatan Birokrat (pelaksana kebijakan harus berdedikasi)
- Intensif (keuntungan atau biaya tertentu)

4. Struktur Birokrasi

## G. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian membutuhkan analisis yang mendalam untuk menjawab permasalahan mengenai fokus penelitian dalam rangka untuk menjawab fenomena di lapangan. Analisis data ini adalah bentuk penyederhanaan agar mudah dibaca dan dipahami maksudnya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagaimana adanya tanpa bermaksud merubah atau membuat kesimpulan yang berlaku umum (Generalisasi).

Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berupa tabel, perhitungan modus, mean, median (pengukuran tendensi sentral, menghitung penyebaran data melalui perhitungan standar dan rata-rata deviasi, serta perhitungan presentase (%). Penentuan presentase dari perolehan data dari hasil kuisioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan presentase.

$$\% = \frac{n}{N} \times 100$$

Keterangan rumus :

n = Skor yang diperoleh

N = Skor ideal

% = *Presentase*

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif.

Dimana hasil persentase itu dapat digolongkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

#### **Persentase Jawaban Tafsiran Kualitatif**

80% - 100%	Sangat Baik
60% - <80%	Baik
40% - <60%	Cukup Baik
20% - <40%	Kurang Baik
0% - <20%	Sangat Tidak Baik

#### **H. Teknik Pengabsahan Data**

Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal bila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Penelitian ini juga menggunakan Teknik pengabsahan data metode trigulasi yaitu :

##### **1. Triangulasi sumber data**

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek serta membandingkan data maupun informasi yang didapat melalui berbagai sumber.

##### **2. Triangulasi metode/teknik**

Triangulasi metode/teknik ini dilakukan dengan cara memeriksa serta menguji data maupun informasi yang didapatkan dari sumber yang



sama<sup>1</sup> tetapi melalui teknik yang berbeda. Misalnya data yang didapat melalui metode wawancara, lalu di cek lagi melalui observasi serta pengecekan terhadap dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Triangulasi waktu

Trigulasi waktu yaitu pengambilan informasi maupun data penelitian dalam kondisi waktu yang berbeda, sebab waktu yang berbeda dapat mempengaruhi kebenaran suatu data yang diperoleh. Misalnya pengambilan data atau informasi melalui wawancara saat pagi hari dapat memberikan data maupun informasi yang lebih valid.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>), dan Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2.43 km<sup>2</sup>) dan Danau Lontoa (1.71 km<sup>2</sup>). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23

hari. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sulawesi Tenggara
- c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Teluk Bone
- d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Luwu Utara

Kabupaten Luwu Timur yang beribu kota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena.

Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 1.820,48 km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari luas daratan sebesar 1.219,00 km<sup>2</sup> dan luas danau sebesar 601,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan Towuti terletak disebelah timur ibukota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Provinsi Sulawesi Tengah disebelah utara, Provinsi Sulawesi Tenggara disebelah timur, dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Malili.

Kecamatan Towuti terdiri dari 18 (delapan belas) desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitif ditambah 1 UPT yaitu UPT SP IV Mahalona. Wilayah Kecamatan Towuti daerah yang seluruh desanya bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Towuti sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar, hal ini dikarenakan ke 16 (enam belas) desanya daerah datar, sedangkan sisanya 6 (enam) desa adalah daerah yang tergolong daerah yang berbukit-bukit. Jumlah penduduk Kecamatan Towuti tahun 2018 (kondisi akhir Desember) mencapai 38.066 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 20.162 jiwa, dan perempuan sebanyak 17.904 jiwa.

## 2. Gambaran Umum Penelitian

Bantuan Stimulan Bedah Rumah atau biasa disingkat BSR merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kemandirian masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah. Adapun bentuk bantuan yang disalurkan oleh pemerintah setempat berupa bahan bangunan material sesuai dengan jumlah dana yang dianggarkan berdasarkan keputusan Bupati.

Adapun jumlah rumah yang dibedah dari tahun 2017-2019 sebanyak 150 unit yang tersebar di lima desa di Kecamatan Towuti. Masing-masing desa mendapatkan bantuan sebanyak 10 unit rumah setiap tahunnya untuk di bedah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.

**Tabel 4.1 Contoh Daftar Rencana Penerima Bantuan Stimulan Bedah****Rumah (BSBR)**

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Umur (Thn)	Pekerjaan	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Ratnawati rita	Perempuan	42	Irt	Tandumata	Bsbr
2.	Addin	Laki-laki	33	Petani	Tandumata	Bsbr
3.	Muliyati	Perempuan	46	Irt	Tandumata	Bsbr
4.	Marming	Laki-laki	27	Petani	Tambuka	Bsbr
5.	Bengga	Laki-laki	60	Petani	Tambuka	Bsbr
6.	Walna	Perempuan	38	Irt	Tambuka	Bsbr
7.	Mija	Perempuan	59	Irt	Ponsoa	Bsbr
8.	Ramli	Laki-laki	38	Petani	Ponsoa	Bsbr
9.	Khaerul	Laki-laki	19	Petani	Ponsoa	Bsbr
10.	Akmaluddin	Laki-laki	39	Petani	Ponsoa	Bsbr

Sumber Data : arsip pemerintah program BSBR

**Tabel 4.2 Anggraa Bantuan Stimulan Bedah Rumah Yang Menerima****Bantuan Tahun 2017-2019**

Nama Desa	Jumlah Unit Rumah Tahun 2017-2019	Anggaran			Total
		2017	2018	2019	
Tole	30	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
Kalosi	30	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
Libukan Mandiri	30	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
Buangin	30	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
Mahalona	30	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>

Dari data yang dipaparkan diatas, fakta yang terjadi dilapangan bahwa masyarakat sudah menerima bantuan dana berupa bahan materiak tetapi masih terdapat beberapa yang belum sempat untuk menyelesaikan pembangunan rumah dikarenakan masyarakat tidak mempunyai biaya untu melanjutkan pembangunan serta biaya untuk menyewa pekerja yang mengakibatkan terhambatnya pengerjaan rumah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

**Tabel 4.3 Daftar Jumlah Rumah Yang Belum Menyelesaikan Pembangunan****Rumah**

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Yang Belum Menyelesaikan Pembangunan			Total
		2017	2018	2019	
1	Tole	-	1	1	2
2	Kalosi	-	-	2	2
3	Libukan Mandiri	-	-	1	1
4	Buangin	-	1	1	2
5	Mahalona	-	-	2	2
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa anggaran atau dana yang diterima masyarakat penerima bantuan tidak menentukan berjalannya pemangunan atau perbaikan rumah dengan melihat masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang belum melakukan pembangunan atau menyelesaikan perbaikan.

a. Tujuan Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR)

- 1) Maksud Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) merupakan pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumah sehingga dapat dihuni dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.
- 2) Tujuan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yakni untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.
- 3) Sasaran Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) didaerah.

b. Persyaratan usulan calon penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR )

- 1) Surat usulan dari desa atau kelurahan dilengkapi daftar data rinci penerima yang terdata dalam database rumah tidak layak huni masing-masing desa atau kelurahan
- 2) Keputusan kepala desa atau lurah tentang pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) desa atau kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 3) Surat permohonan calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 4) Surat pernyataan calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 5) Surat kesepakatan sosial kelompok penerima bantuan stimulan bedah rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 6) Fotokopi sertifikat hal atas tanah, fotokopi suat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa atau lurah bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 7) Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi karty tanda penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima BSBR.

8) Surat pernyataan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

9) Daftar rencana pembelian bahan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M dan huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

c. SOP dan Organisasi Pelaksana

1) Pokja Kabupaten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Melakukan sosialisasi kepada Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/ Kelurahan.
- b) Melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan yang masuk dari Pokja Desa/ Kelurahan melalui Pokja Kecamatan.
- c) Menyampaikan calon penerima BSBR hasil verifikasi kepada Bupati.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dari Pokja Kecamatan ke Bupati

2) Pokja Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan yang masuk dari Pokja Desa/ Kelurahan.
- b) Mengumumkan daftar calon penerima BSBR.
- c) Menyampaikan daftar calon penerima BSBR hasil verifikasi kepada Pokja Kabupaten.



- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan.
  - e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pokja Desa/ Kelurahan kepada Pokja Kabupaten
- 3) Pokja Desa/ Kelurahan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima.
  - b) Melakukan penjangingan MBR dan atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat.
  - c) Membentuk KPD ditingkat Desa/ Kelurahan.
  - d) Melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).
  - e) Mengumumkan calon penerima bantuan.
  - f) Menyampaikan daftar calon penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) hasil verifikasi lapangan kepada Pokja Kecamatan.
  - g) Mendampingi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) melaporkan pelaksana kegiatan kepada Pokja Kecamatan.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November-Januari 2021, peneliti melakukan penelitian dengan observasi langsung dilapangan, melihat bagaimana kondisi yang menjadi objek penelitian yaitu Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Pengumpulan data baik data sekunder maupun data primer penulis melakukan observasi langsung dengan para pelaksana program BSBR dengan pengambilan data melalui dokumen data dan penyebaran kuisisioner terhadap

pelaksana. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat yang menerima bantuan BSBR pada Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Terdapat 15 sampel pelaksana dari masing-masing desa dan 10 masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini. Adapun hasil data yang yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara diuraikan sebagai berikut.

## 1. Hasil Analisis Deskriptif

### a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan. Komunikasi yaitu:

#### 1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik antar birokrasi yang terlibat dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus dilakukan dengan baik sehingga tidak adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang menjadi tujuan dari pada Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dapat tercapai.

Dengan adanya indikator tranmisi maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Komunikasi antar pelaksana yang terlibat dalam implementasi bantuan stimulan bedah rumah (BSBR) berjalan dengan baik.
- b) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan
- c) Pesan yang disampaikan mampu mempengaruhi sikap misalnya menindak lanjuti pesan yang disampaikan kesatu pelaksana kepada pelaksana yang lain. Hasil pernyataan tranmisi oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Komunikasi antar pelaksana berjalan dengan baik.**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Baik	1	0	-
Tidak Baik	2	0	-
Baik	3	7	46,6 %
Sangat Baik	4	8	53,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah

Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 7 responden menjawab baik dengan persentase 46,6 % dan 8 responden menjawab sangat baik dengan persentase 53,3 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Komunikasi antar pelaksana yang terlibat dalam implementasi bantuan stimulan bedah rumah (BSBR) telah masuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa segala informasi yang dilakukan dilapangan dapat ditemukan dan dijawab oleh pelaksana sehingga data yang dibutuhkan peneliti mengenai tentang program BSBR sudah tercukupi.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mengenai sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat penerima bantuan BSBR yang berinisial KA :

*“sosialisasi terkait bantuan BSBR sudah disampaikan oleh pemerintah desa pada saat pendataan dan survey lapangan, dan pemerintah menurut saya sudah transparan terkait anggaran yang diberikan karena diperlihatkan nota pembelanjaan bahan bangunan sesuai permintaan masyarakat.”*

**Tabel 4.4**  
**Sosialisasi yang diterima tidak membingungkan**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Membingungkan	1	0	-
Memmingungkan	2	0	-
Tidak Membingungkan	3	10	66,6 %
Sangat Tidak Membingungkan	4	5	33,3 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa dari 15 responden 10 orang menjawab tidak membingungkan dengan persentase 66,6 % dan 5 responden menjawab sangat tidak membingungkan dengan persentase 3,33 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan masuk dalam kategori baik.

Hasil data pada tabel tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu informan berinisial AS yang menyatakan bahwa:

*"alhamdulillah program bantuan stimulan bedah rumah ini sangat membantu, terutama informasi yang disampaikan oleh pelaksana itu jelas dan mudah untuk dipahami sehingga saya dalam pengurusan berkas tidak sulit dan saya rasa jelas sehingga cepat rangkum berkasnya"*

**Tabel 4.4**  
**Pesan yang disampaikan berpengaruh antar pelaksana**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Berpengaruh	1	0	-
Tidak Berpengaruh	2	0	-
Berpengaruh	3	6	40 %
Sangat Berpengaruh	4	9	60 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 6 responden menjawab berpengaruh dengan persentase 40% dan 9 responden menjawab sangat berpengaruh dengan persentase 60 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Pesan yang disampaikan mampu mempengaruhi sikap misalnya menindak lanjuti pesan yang disampaikan kesatu pelaksana kepada pelaksana yang lain masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi indikator komunikasi**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Komunikasi antar pelaksana yang terlibat dalam implementasi bantuan stimulan bedah rumah (BSBR) berjalan dengan baik.	53,3 %	46,6 %	-	-
2.	Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan	33,3 %	66,6 %	-	-
3.	Pesan yang disampaikan mampu mempengaruhi sikap misalnya menindak lanjuti pesan yang disampaikan kesatu pelaksana kepada pelaksana yang lain.	60 %	40 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>48,8 %</b>	<b>51 %</b>		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator komunikasi yang menyatakan sangat setuju sebesar 48,8 % dan setuju sebesar 51 %.

## 2) Kejelasan

Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus jelas dan tidak membingungkan. Komunikasi yang jelas ini bertujuan agar tidak terjadinya penyelewengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan yaitu efektivitasnya pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya salah tafsir akan substansi kebijakan. Dengan adanya indikator kejelasan maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Proses komunikasi antar pelaksana yang terlibat mampu saling memahami pesan secara cermat sesuai yang disampaikan oleh komunikator pelaksana.
- b) Komunikasi dilakukan dapat berlangsung secara menyenangkan kedua belah pihak dengan tujuan mampu membangun hubungan emosional yang baik.
- c) Pesan yang disampaikan tidak mengakibatkan salah penafsiran terhadap penerima pesan pada Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Hasil pernyataan kejelasan oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Proses komunikasi antar pelaksana mampu saling memahami**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Memahami	1	0	-
Tidak Memahami	2	0	-
Memahami	3	6	40 %
Sangat Memahami	4	9	60 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 6 responden orang menjawab memahami dengan persentase 40 % dan 9 responden menjawab sangat memahami dengan persentase 60 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Proses komunikasi antar pelaksana yang terlibat mampu saling memahami pesan secara cermat sesuai yang disampaikan oleh komunikator pelaksana masuk dalam kategori baik.



**Tabel 4.8**  
**Komunikasi dilakukan dapat berlangsung secara menyenangkan**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	10	66,6 %
Sangat Setuju	4	5	33,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 10 responden orang menjawab setuju dengan persentase 66,6 % dan 5 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 3,33 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Komunikasi dilakukan dapat berlangsung secara menyenangkan kedua belah pihak dengan tujuan mampu membangun hubungan emosional yang baik masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.9**  
**Pesan yang disampaikan tidak mengakibatkan salah penafsiran**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	3	20 %
Sangat Setuju	4	12	80 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 3 responden menjawab setuju dengan persentase 20 % dan 12 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 80 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Pesan yang disampaikan tidak mengakibatkan salah penafsiran terhadap penerima pesan pada bantuan stimulan bedah rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Indikator Kejelasan**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Proses komunikasi antar pelaksana yang terlibat mampu saling memahami pesan secara cermat sesuai yang disampaikan oleh komunikator pelaksana	60 %	40 %	-	-
2.	Proses komunikasi antar pelaksana yang terlibat mampu saling memahami pesan secara cermat sesuai yang disampaikan oleh komunikator pelaksana	33,3 %	66,6 %	-	-
3.	Pesan yang disampaikan tidak mengakibatkan salah penafsiran terhadap penerima pesan pada bantuan stimulan bedah rumah (BSBR)	80 %	20 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>41,1 %</b>	<b>42,2 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator kejelasan yang menyatakan sangat setuju sebesar 41,1 % dan setuju sebesar 42,2%.

### 3) Konsisten

Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang dibiarkan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dengan adanya indikator konsistensi maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Perintah yang diberikan kepada pelaksana Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) konsisten untuk dijalankan
- b) Perintah yang diberikan kepada pelaksana Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak berubah-ubah
- c) Perintah yang diberikan selaras antara perintah dan pelaksanaannya dilapangan pada Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Hasil pernyataan konsisten oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.11**  
**Perintah yang diberikan konsisten untuk dijalankan**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	6	40 %
Sangat Setuju	4	9	60 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 6 responden menjawab t setuju dengan persentase 40% dan 9 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 60 %

dari hasil persentase maka dapat diketahui Perintah yang diberikan kepada pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) konsisten untuk dijalankan masuk dalam kategori baik.

Hasil data pada tabel tersebut sesuai dengan pernyataan oleh salah satu informan berinisial “LA” yang menyatakan bahwa:

*“Iya itu pelaksanaan program bedah rumah sudah dijalankan cukup baik dan proses pelaksanaan mereka tuntas sebelum bantuan itu diberikan kepada penerima bantuan. Contohnya kalo dia janji kita untuk bahan bangunan diperadakan dalam jangka 1 minggu maka dia adakan betul tawwa dalam jangka 1 minggu itu jadi saya pikir bisaji dipegang bicaranya pelaksana”*

**Tabel 4.12**  
**Perintah yang diberikan kepada pelaksana tidak berubah-ubah**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	10	66,6 %
Sangat Setuju	4	5	33,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 10 responden menjawab setuju dengan persentase 66,6 % dan 5 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 3,33 %

dari hasil persentase maka dapat diketahui Perintah yang diberikan kepada pelaksana Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak berubah-berubah masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.13**  
**Perintah yang diberikan selaras antara perintah dan pelaksanaannya**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	9	60 %
Sangat Setuju	4	6	40 %
Total ( $\Sigma$ )		6	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 9 responden menjawab setuju dengan persentase 60 % dan 6 responden menjawab setuju dengan persentase 40 %, dari hasil persentase maka dapat diketahui Perintah yang diberikan selaras antara perintah dan pelaksanaannya dilapangan pada Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.14**  
**Rekapitulasi Indikator Konsisten**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Perintah yang diberikan kepada pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) konsisten untuk dijalankan	60 %	40 %	-	-
2.	Perintah yang diberikan kepada pelaksana Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak berubah-berubah	33,3 %	66,6 %	-	-
3.	Perintah yang diberikan selaras antara perintah dan pelaksanaannya dilapangan pada Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)	40 %	60 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>44,4 %</b>	<b>53,5 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator konsisten yang menyatakan sangat setuju sebesar 44,4 % dan setuju sebesar 53,5 %.

**b. Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasi kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan rapi dan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan. Komunikasi menurut George C. Edward III ada 3 variabel yaitu (1). Staf/pegawai (2). Wewenang (3). Informasi.

### 1) Staf/Pegawai

Staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yaitu para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Diperlukannya implementor yang memiliki mencukupi, memadai, ataupun kompeten dengan bidangnya. Diperlukannya (*the right man in the right place*). Dengan adanya indikator Staf maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Pelaksana yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) berkompeten dalam bidangnya.
- b) Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) memadai dari segi pendidikannya
- c) Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) mencukupi dari segi jumlahnya. Hasil pernyataan Staf/pegawai oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut



**Tabel 4.15**  
**Pelaksana yang terlibat berkompeten dalam bidangnya.**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Berkompeten	1	0	-
Tidak Berkompeten	2	0	-
Berkompeten	3	4	26,6 %
Sangat Berkompeten	4	11	73,3 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 4 responden orang menjawab berkompeten dengan persentase 26,6 % dan 11 responden menjawab sangat berkompeten dengan persentase 73,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) berkompeten dalam bidangnya masuk dalam kategori baik.

Untuk memastikan pernyataan tersebut penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat penerima bantuan yang berinisial AM :

*“menurut saya pelaksana sudah berkompeten karena selama pelaksanaan berlangsung, pelaksana sudah professional dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.”*

**Tabel 4.16**  
**Pelaksana program memadai dari segi pendidikan**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Memadai	1	0	-
Tidak Memadai	2	0	-
Memadai	3	5	33,3 %
Sangat Memadai	4	10	66,6 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>6</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 5 responden menjawab memadai dengan persentase 33,3 % dan 10 responden menjawab sangat memadai dengan persentase 66,6 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) memadai dari segi pendidikannya masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.17**  
**Tingkat Kecukupan Pelaksana Program**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Cukup	1	0	-
Tidak Cukup	2	0	-
Cukup	3	7	46,6 %
Sangat Cukup	4	8	53,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 7 responden menjawab cukup dengan persentase 46,6 % dan 8 responden menjawab sangat cukup dengan persentase 53,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) mencukupi dari segi jumlahnya masuk dalam kategori baik.

Untuk memastikan pernyataan tersebut penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat penerima bantuan yang berinisial AM :

*"menurut saya pelaksana sudah cukupmi karena pelaksana ada tiga orang yang biasa bergantian datang kerumah untuk pendataan, sampai penyaluran bantuan."*

**Tabel 4.18**  
**Rekapitulasi Indikator Staf atau Pegawai**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Perintah yang diberikan kepada pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) konsisten untuk dijalankan	73,3 %	26,6 %	-	-
2.	Perintah yang diberikan kepada pelaksana Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak berubah-ubah	66,6 %	33,3 %	-	-
3.	Perintah yang diberikan selaras antara perintah dan pelaksanaannya di lapangan pada Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)	53,3 %	46,6 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>64,4 %</b>	<b>35,5 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator Staf atau Pegawai yang menyatakan sangat setuju sebesar 44,4 % dan setuju sebesar 53,5 %.

## 2) Wewenang

Efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), efektifitas pelaksana diharapkan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam pelaksanaan program tersebut, tidak melaksanakan program untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi harus murni sesuai obyek Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Dengan

adanya indikator Wewenang maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) menggunakan wewenang seobjektif mungkin dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki
- b) Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) mengetahui dan taat terhadap peraturan dan relasi yang telah diterapkan
- c) Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak melaksanakan program untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya tetapi harus murni sesuai obyek program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Hasil pernyataan Wewenang oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.19**  
**Pelaksana menggunakan wewenang dengan objektif**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	13	86,6 %
Sangat Setuju	4	2	13,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 13 responden menjawab setuju dengan persentase 86,6 % dan 2 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 13,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) menggunakan wewenang seobjektif mungkin dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.20**  
**Pelaksana mengetahui dan taat terhadap peraturan**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	4	26,6 %
Sangat Setuju	4	11	73,3 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		15	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 4 responden menjawab setuju dengan persentase

26,6 % dan 11 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 73,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) mengetahui dan taat terhadap peraturan dan relasi yang telah diterapkan masuk dalam kategori baik.

Hasil persentase pada tabel tersebut sesuai dengan pernyataan oleh salah satu informan “AM” yang menyatakan bahwa :

*“saya perhatikan bagian pelaksanaannya ini program BSBR semua terampilji dan profesional dalam pelaksanaannya kemungkinan karna ini pelaksana taat aturan jadi bagus tawwa pelaksanaannya”.*

**Tabel 4.21**  
**Pelaksana menjalankan tugasnya dengan objektif**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	10	66,6 %
Sangat Setuju	4	5	33,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 10 responden menjawab setuju dengan persentase 66,6 % dan 5 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 3,33 % dari hasil persentase maka dapat diketahui dalam pelaksanaan program

Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak melaksanakan program untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya tetapi harus murni sesuai obyek program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.22**  
**Rekapitulasi Indikator Wewenang**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) menggunakan wewenang seobjektif mungkin dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki	13,3 %	86,6 %	-	-
2.	Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) mengetahui dan taat terhadap peraturan dan relasi yang telah diterapkan	73,3 %	26,6 %	-	-
3.	Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tidak melaksanakan program untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya tetapi harus murni sesuai obyek program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).	33,3 %	66,6 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>39,9 %</b>	<b>59,9 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator wewenang yang menyatakan sangat setuju sebesar 39,9 % dan setuju sebesar 59,9 %.



### 3) Informasi

Pelaksana Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apakah orang yang dilibatkan dalam proses kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tersebut patuh terhadap hukum. Dengan adanya indikator Informasi maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan
- b) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
- c) Implementor program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui orang yang dilibatkan dalam proses kebijakan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tersebut patuh terhadap hukum. Hasil pernyataan informasi oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.23**  
**Pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Mengetahui	1	0	-
Tidak Mengetahui	2	0	-
Mengetahui	3	7	46,6 %
Sangat Mengetahui	4	8	53,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui 7 responden menjawab mengetahui dengan persentase 46,6 % dan 8 responden menjawab sangat mengetahui dengan persentase 53,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.24**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaksana Terhadap Regulasi**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Patuh	1	0	-
Tidak Patuh	2	0	-
Patuh	3	8	53,3 %
Sangat Patuh	4	7	46,6 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa dari 15 responden 10 orang menjawab sangat patuh dengan persentase 66,6 % dan 5 responden menjawab patuh dengan persentase 3,33 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.25**  
**Kepatuhan Pelaksana Terhadap Hukum**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Patuh	1	0	-
Tidak Patuh	2	0	-
Patuh	3	15	100 %
Sangat Patuh	4	0	-
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>6</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 15 responden menjawab patuh dengan persentase 100 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Implementor program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui orang yang dilibatkan dalam proses kebijakan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tersebut patuh terhadap hokum masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.26**  
**Rekapitulasi Indikator Informasi**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan	53,3 %	36,6 %	-	-
2.	Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan	46,6 %	53,3 %	-	-
3.	Implementor program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus mengetahui orang yang dilibatkan dalam proses kebijakan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) tersebut patuh terhadap hukum		100%	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>33,3 %</b>	<b>63,3 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator Informasi yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,3 % dan setuju sebesar 63,3 %.

#### 4) Fasilitas

Fasilitas merupakan adanya sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan Implementor agar dapat menjalankan tugasnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Dengan adanya indikator fasilitas maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan implementor
- b) Adanya media teknologi yang memudahkan dalam proses pelaksanaan
- c) Fasilitas yang disediakan masuk dalam kategori layak dan memadai untuk digunakan. Hasil pernyataan fasilitas oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.27**  
**Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Lengkap	1	0	-
Tidak Lengkap	2	0	-
Lengkap	3	13	86,6 %
Sangat Lengkap	4	2	13,3 %
Total (Σ)		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 13 responden menjawab lembar dengan persentase 86,6 % dan 2 responden menjawab sangat lengkap dengan persentase 13,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan implementor masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.28**  
**Tingkat Kemudahan Teknologi**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Mudah	1	0	-
Tidak Mudah	2	0	-
Mudah	3	13	86,6 %
Sangat Mudah	4	2	13,3 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>6</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 13 responden menjawab mudah dengan persentase 86,6 % dan 2 responden menjawab sangat mudah dengan persentase 13,3 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Adanya media teknologi yang memudahkan dalam proses pelaksanaan masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.29**  
**Fasilitas yang disediakan layak dan memadai untuk digunakan**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Layak	1	0	-
Tidak Layak	2	0	-
Layak	3	4	26,6 %
Sangat Layak	4	11	73,3 %
Total ( $\Sigma$ )		6	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 4 responden menjawab layak dengan persentase 26,6 % dan 11 responden menjawab sangat layak dengan persentase 73,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Fasilitas yang disediakan masuk dalam kategori layak dana memadai untuk digunakan masuk dalam kategori baik. Adapun gambaran bantuan beserta anggaran dan bahan bangunan yang diterima masyarakat dalam jangka 1 tahun sebagai berikut:



**Tabel 4.30**  
**Rencana Pembelian Bahan Bangunan**

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	Seng 10 kaki	Lembar	16.00	85,000	1,360.000
2	Semen Tonasa Kaki 50 Kg	Zak	23.00	85,000	1.955.000
3	Paku seng	Dos	2.00	30,000	60.000
4	Paku 7 cm	Kg	4.00	25,000	100.000
5	Paku 10 cm	Kg	3.00	80,000	75.000
6	Cat layu 1 kg	Kaleng	1.00	85,000	80.000
7	Cat tembok 5 kg	Kaleng	4.00	35,000	340.000
8	Papan 2 x 25 x 400 cm	Lembar	70.00	35,000	2.450.000
9	Balok 5 x 10x 400 cm	Batang	50.00	60,000	1.750.000
10	Tiang 10 x10 x 300	Batang	4.00	60,000	240.000
11	Engsel	Buah	3.00	30,000	90.000
12	Pasir	Ret	2.00	750.000	1.500.000
Total Pemberian					10.000.000

*Sumber data arsip pemerintah program BSBR*

Hasil persentase pada tabel tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan yang berinisial D yang menyatakan bahwa:

*“bersyukurmi itu ada bantuan BSBR yang didapat dari pemerintah bantuan yang dikasihkan juga berupa bahan bangunan yang dibeil langsung dari toko bangunan dan berkualitas jadi dari masyarakat saja itu dia mau renovasi rumahnya bagaimana pemerintah sudah fasilitasi semuanya dengan bantuan langsung dia berikan”*

Informan yang berbeda berpendapat lain terhadap fasilitas dan kinerja dari pelaksana program BSBR yang berinisial AS yang “menyatakan bahwa :

*“Ini dana yang diberikan itu belumpi kasian mencukupi apalagi saya punya rumah yang lumayan besar paling setengah ji saja yang bisa dikerjakan dari bahan material yang na sediakan pelaksana jadi terpaksa nmi saya tambahkan dana pribadi untuk selesaikan perbiakn ditambah tidak ada juga tukang na sediakan jadi ada biaya tambahan untuk bayar tukangnyanya”*

Hal serupa juga dirasakan oleh informan yang berinisial RM yang menyatakan bahwa :

*“Memang betul ada bantuan pemerintah saya juga dapat tapi tidak maksimalki karna saya sendiri juga yang kerja rumahku kadang menganggurmi tukangku karena terlambat bantuan datang biasa na janjiki satu minggu tetapi hampir dua minggu baru datang bahannya”*

**Tabel 4.31**  
**Rekapitulasi Indikator Fasilitas**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan implementor	13,3 %	86,6 %		-
2.	Adanya media teknologi yang memudahkan dalam proses pelaksanaan	13,3 %	86,6 %	-	-
3.	Fasilitas yang disediakan masuk dalam kategori layak dana memadai untuk digunakan	73,3	26,6 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>33,3%</b>	<b>66,6 %</b>		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator faislitas yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,3 % dan setuju sebesar 66,6 %.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan. Komunikasi menurut George C. Edward III ada 3 variabel yaitu (1). Pengangkatan birokrat, (2). Insentif (3). Struktur birokrasi.

1) Pengangkatan Birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), lebih khusus lagi memilih orang yang benar-benar kepentingannya untuk masyarakat. Dengan adanya indikator pengangkatan birokrat maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Pemilihan dan pengangkatan personil dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), memiliki dedikasi atau pengabdian yang tinggi
- b) Secara administrasi terlaksana secara tertib dalam proses program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).
- c) Pelaksana yang terpilih dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan orang-orang yang

memutamakan kepentingan masyarakat. Hasil pernyataan disposisi oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.32**  
**Dedikasi dalam pengangkatan personil**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Berdedikasi	1	0	-
Tidak Berdedikasi	2	0	-
Berdedikasi	3	12	80 %
Sangat Berdedikasi	4	3	20 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 12 responden menjawab Berdedikasi dengan persentase 80 % dan 3 responden menjawab sangat berdedikasi dengan persentase 20 %. Dari hasil persentase tersebut dapat diketahui bahwa Pemilihan dan pengangkatan personil dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), memiliki dedikasi atau pengabdian yang tinggi sudah masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.33**  
**Secara administrasi terlaksana secara tertib**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Tertib	1	0	-
Tidak Tertib	2	0	-
Tertib	3	5	33,3 %
Sangat Tertib	4	10	66,6 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 5 responden menjawab tertib dengan persentase 33,3 % dan 10 responden menjawab sangat tertib dengan persentase 66,6 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Secara administrasi terlaksana secara tertib dalam proses program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

Tabel 4.34

**Pelaksana merupakan orang yang memutamakan kepentingan masyarakat**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	2	13,3 %
Sangat Setuju	4	13	86,6 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 2 responden menjawab setuju dengan persentase 13,3 % dan 13 responden menjawab setuju dengan persentase 86,6 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana yang terpilih dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan orang-orang yang memutamakan kepentingan masyarakat masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.35**  
**Rekapitulasi Indikator Disposisi**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Pemilihan dan pengangkatan personil dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR), memiliki dedikasi atau pengabdian yang tinggi	20 %	80 %	-	-
2.	Secara administrasi terlaksana secara tertib dalam proses porgram Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).	66,6 %	33,3 %	-	-
3.	Pelaksana yang terpilih dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan orang-orang yang mengutamakan kepentingan masyarakat	86,6 %	13,3 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>57,7 %</b>	<b>42,2 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator disposisi yang menyatakan sangat setuju sebesar 57,7% dan setuju sebesar 42,2 %.

## 2) Insentif

memberikan keuntungan atau biaya lebih kepada pelaksana Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) merupakan salah satu langkah yang harus diberikan agar dapat mendorong sekaligus menjadi motivasi agar pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) melaksanakan tugasnya dengan

baik. Dengan adanya indikator insentif maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Memberikan biaya lebih atau insentif kepada pelaksana agar dapat mendorong menjadi motivasi pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b) Pelaksana mendapatkan kompensasi dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)
- c) Penghargaan bagi pelaksana yang baik berupa jumlah uang atau barang. Hasil pernyataan insentif oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.36**  
**Adanya biaya lebih atau insentif kepada pelaksana**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	14	93,3 %
Sangat Setuju	4	1	6,6 %
Total ( $\Sigma$ )		0	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*



Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 14 responden orang menjawab setuju dengan persentase 93,3 % dan 1 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 6,6 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Memberikan biaya lebih atau insentif kepada pelaksana agar dapat mendorong menjadi motivasi pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) melaksanakan tugasnya dengan baik masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.37**  
**Adanya kompensasi dari program terhadap pelaksana**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	10	66,6 %
Sangat Setuju	4	5	33,3 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 10 responden menjawab setuju dengan persentase 66,6 % dan 5 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 3,33 %

dari hasil persentase maka dapat diketahui Pelaksana mendapatkan kompensasi dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.38**  
**Adanya Penghargaan bagi pelaksana yang bekerja dengan baik**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	6	40 %
Sangat Setuju	4	9	60 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 6 responden orang menjawab setuju dengan persentase 40 % dan 9 responden menjawab setuju dengan persentase 60 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Penghargaan bagi pelaksana yang baik berupa jumlah uang atau barang masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.39**  
**Rekapitulasi Indikator Insentif**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Memberikan biaya lebih atau insentif kepada pelaksana agar dapat mendorong menjadi motivasi pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) melaksanakan tugasnya dengan baik	6,6 %	93,3 %	-	-
2.	Pelaksana mendapatkan kompensasi dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)	33,3 %	66,6 %	-	-
3.	Penghargaan bagi pelaksana yang baik berupa jumlah uang atau barang	60 %	40 %	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>33,3 %</b>	<b>66,6 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator disposisi yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,3% dan setuju sebesar 66,6 %.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) harus jelas sehingga kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini diperlukan agar tidak menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan atau program Bantuan

Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Dengan adanya indikator struktur birokrasi maka diperlukan subindikator yang terdiri dari:

- a) Struktur birokrasi dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas.
- b) Birokrasi mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik pada program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).
- c) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).
- d) Birokrasi yang diterapkan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik pada pelaksana maupun masyarakat pada program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR).
- e) Birokrasi yang diterapkan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Hasil pernyataan struktur birokrasi oleh responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.40**  
**Struktur birokrasi dalam program jelas**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Jelas	1	0	-
Tidak Jelas	2	0	-
Jelas	3	7	46,6 %
Sangat Jelas	4	8	53,3 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 7 responden menjawab jelas dengan persentase 46,6 % dan 8 responden menjawab sangat jelas dengan persentase 53,3 % dari hasil persentase maka dapat diketahui Struktur birokrasi dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas masuk dalam kategori baik.

Hasil persentase pada tabel tersebut sesuai dengan hasil pernyataan informan yang berinisial A yang menyatakan bahwa:

*"setau saya penanggung jawab pusat itu bupati dan setiap daerah ada namanya kepala desa dan pelaksana lapangan orang-orang kantor desa atau camat jadi memang jelas strukturnya dan pelaksananya juga sudah di SK kan".*

**Tabel 4.41**  
**Birokrasi mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Mendukung	1	0	-
Tidak Mendukung	2	0	-
Mendukung	3	3	40 %
Sangat Mendukung	4	12	60 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		15	100

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 3 menjawab sangat mendukung dengan persentase 40 % dan 12 responden menjawab mendukung dengan persentase 60 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Birokrasi mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik pada program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.42**  
**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari program**

<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Skor (x)</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tidak Puas	1	0	-
Tidak Puas	2	0	-
Puas	3	12	80 %
Sangat Puas	4	3	20 %
<b>Total ( <math>\Sigma</math> )</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 12 responden menjawab sangat puas dengan persentase 80 % dan 3 responden menjawab puas dengan persentase 20 %. Dari hasil persentase dapat diketahui Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

Hasil persentase pada tabel tersebut mendapatkan jawaban yang sesuai dari salah satu informan yang berinisial S yang menyatakan bahwa:

*“saya sebagai penerima bantuan merasa bersyukur dengan adanya program ini, karena siapa yang mau kasi kita bahan bangunan untuk perbaikan rumah dengan cuma-cuma, jadi saya merasa puas dengan adanya ini program”*

**Tabel 4.43**  
**Birokrasi yang diterapkan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	12	80 %
Sangat Setuju	4	3	20 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 12 responden menjawab sangat setuju dengan persentase 80 % dan 3 responden menjawab setuju dengan persentase 20 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Birokrasi yang diterapkan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik pada pelaksana maupun masyarakat pada program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

Hasil persentase pada tabel tersebut mendapatkan jawaban yang sesuai dari salah satu informan yang berinisial D yang menyatakan bahwa:

*“menurut saya tidak adaji penyelewengan anggaran karena dana yang diberikan pelaksana itu sudah sesuai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 dan kita sendiri masyarakat yang mencatat apa-apa yang kita butuhkan baru adaji juga nota pembelanjaan yang nakasikanki sesuai dengan apa yang dicatat.”*



**Tabel 4.44**  
**Birokrasi yang diterapkan tidak merugikan**

Tanggapan Responden	Skor (x)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	1	0	-
Tidak Setuju	2	0	-
Setuju	3	12	80 %
Sangat Setuju	4	3	20 %
Total ( $\Sigma$ )		15	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil jawaban responden terkait Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan program bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) jelas dan tidak membingungkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 12 resp

onden menjawab sangat setuju dengan persentase 80 % dan 3 responden menjawab setuju dengan persentase 20 %. Dari hasil persentase maka dapat diketahui Birokrasi yang diterapkan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 4.45**  
**Rekapitulasi Indikator Struktur Birokrasi**

No.	Aspek Akurat	SS	S	T	STS
1.	Memberikan biaya lebih atau insentif kepada pelaksana agar dapat mendorong menjadi motivasi pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) melaksanakan tugasnya dengan baik	53,3 %	46,6 %	-	-
2.	Pelaksana mendapatkan kompensasi dari program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)	60 %	40 %	-	-
3.	Penghargaan bagi pelaksana yang baik berupa jumlah uang atau barang	20 %	80 %	-	-
4.		20 %	80 %		
5.		20 %	80 %		
	<b>Rata-rata</b>	<b>34,6 %</b>	<b>65,3 %</b>		

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2020*

Dari hasil rekapitulasi tabel tersebut maka dapat diketahui nilai rata-rata pernyataan responden pada indikator Struktur Birokrasi yang menyatakan sangat setuju sebesar 34,6% dan setuju sebesar 65,3 %.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh maka adapun kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut.

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah berjalan dengan baik yang dimana mencakup tentang kebijakan, informasi yang jelas dan konsistensi telah dijalankan sesuai prosedur dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat khususnya penerima bantuan. Sumberdaya yang dimiliki dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah memadai baik dari sumber daya manusia, wewenang, informasi serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan program stimulan bedah rumah dimasa akan datang.

Birokrasi yang dimiliki oleh program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah baik dan memiliki sistem yang jelas. Pelaksana sudah menjalankan secara objektif dan taat kepada aturan akan tetapi pelaksana teknis maupun konsep harus menguasai prosedur, wewenang dan aturan agar dapat menjalankan program lebih baik lagi. Struktur birokrasi program bantuan stimulan bedah rumah sudah jelas dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidang dan amanah masing-masing sehingga setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh maka adapun kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemerintahan membentuk tim lapangan yang bertugas untuk merenovasi rumah masyarakat. Karena dengan adanya tim renovasi maka penggunaan bahan material lebih dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa harus menjadi tanggung jawab masyarakat lagi dalam proses renovasi.
2. Sebaiknya sosialisasi terkait Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) khususnya terkait dengan jumlah uang yang diterima masyarakat harus dijelaskan secara detail agar masyarakat paham bahwa uang yang diberikan itu hanya untuk menutupi kerusakan ringan bukan untuk memperbaiki rumah keseluruhan.
3. Pelaksana sebaiknya rutin mendapatkan pengetahuan dan melakukan riset lapangan terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat dan kekurangan pada saat proses pelaksanaan program bantuan stimulan bedah rumah.
4. Diharapkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya agar pemerintah melihat keseriusan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima bantuan agar bantuan ini dapat terus berjalan kedepannya.
5. Diharapkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (TARKIM) Kabupaten Luwu Timur selaku pelaksana program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) agar sekiranya bisa langsung turun ke lapangan

guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amahoru, I. (2019). *program BSBR di luwu timur sudah cover 3.659 rumah tidak layak huni*. News.Rakyatku.Com.
- Andriani, A. S., Mahsyar, A., & Malik, I. (2019). *Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Studi Kasus Di Kabupaten Bulukumba Dan Takalar)*. *JPPM:Journal Of Public Policy and Management*, 1(1), 22-28
- Bima, G. (2013). *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tehing Kabupaten Karimun Tahun 2013*. 0–20.
- Fadilla, Y. (2019). *Kementerian PUPR: 43 juta rumah di indonesia tak layak huni*. *Jogja.Indtimes.Com*.
- Juanda, M. P. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung (Doctoral dissertation, UNPAS)*.
- Kurniawan, A., Purnaweni, H., & Fathurrohman, F. (2015). *Implementasi Program Mandiri Pangan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(4), 256-266.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nawi, A., Lestari, A. W., Studi, P., Administrasi, I., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. 7(1), 11–16.
- Nugraha, A. F. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang*. 1–201.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 tahun 2019 *Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitaitif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1.



## RIWAYAT HIDUP



**ASRIANI**, Lahir di Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 29 Januari 1998, Anak ketiga dari enam bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bapak Kenden dan Ibu Agu. Penulis menempuh pendidikan di SDN 267 Mahalona, pada 2010 melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Towuti, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Techno Terapan Makassar dengan jurusan Keperawatan *plus* Kebidanan, pada 2016 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, penulis mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2021 dengan gelar sarjana (S.Sos). Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.